

**PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, TINDAK
LANJUT HASIL AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI**

(Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021)



Skripsi Oleh

NABILA AZZAHRA

01031182025040

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
TERHADAP TINGKAT KORUPSI
(STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2017-2021)

Disusun oleh:

Nama : Nabila Azzahra
NIM : 01031182025040
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Pengauditan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Tanggal

: 10 Mei 2024

Dosen Pembimbing

Ketua



Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198812102019032017

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, TINDAK LANJUT HASIL
AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI
(STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2017-2021)**

Disusun Oleh :

Nama : Nabila Azzahra
NIM : 01031182025040
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Pengauditan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 12 Juli 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 17 Juli 2024

Ketua,



Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak
NIP 198812102019032017

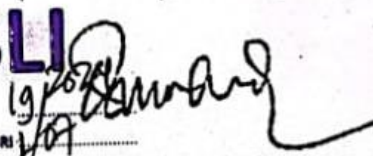
Anggota,



H. Aspahadi, S.E., M.M., Ak
NIP 196607041992031004

Mengetahui,
Plt. Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph.D.
NIP 196211121989111001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nabila Azzahra
NIM : 01031182025040
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Pengauditan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI (STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2017-2021)

Pembimbing : Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak
Tanggal Ujian : 12 Juli 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 18 Juli 2024
Pembuat Pernyataan,



Nabila Azzahra
NIM. 01031182025040

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Selalu percaya dengan kekuatan doa, kun fayakun”

“libatkan Allah SWT dalam segala urusan, maka tidak ada yang mampu
menghalanginya”

“Sesungguhnya sesudah kesuliatan itu ada kemudahan” (QS. Al Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk Allah SWT, Ibu, Bapak, Kakak dan Ayuk,
Keponakan, Seluruh keluarga besar, Sahabat, Teman-teman seperjuangan, dan
Almamaterku.

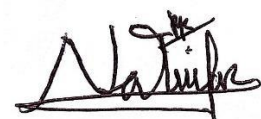
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada program Strata Satu (S-1) Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Skripsi ini membahas tentang apakah opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk skripsi ini agar penelitian yang terkait skripsi ini di masa depan dapat lebih baik lagi. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat untuk lingkungan akademik maupun praktisi, serta menjadi referensi dan informasi tambahan bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Indralaya,

Penulis,



Nabila Azzahra

NIM. 01031182025040

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sadar bahwa selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini terdapat serangkaian kendala dan hambatan. Namun, kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Atas hal tersebut, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, atas seluruh nikmat dan pertolongan yang telah diberikan kepada Penulis.
2. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
3. Bapak **Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
4. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu **Dr. E. Yusnaini. S.E., M.Si., Ak** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Aryanto, S.E., M.Tl., Ak** dan Ibu **Dr. E. Yusnaini. S.E., M.Si., Ak** selaku dosen pembimbing akademik atas waktu, arahan dan masukan yang telah diberikan selama proses perkuliahan.
6. Ibu **Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak** selaku dosen pembimbing proposal penelitian dan skripsi yang telah meluangkan waktu selama proses bimbingan skripsi dan memberikan arahan, saran serta kritikan yang bermanfaat sehingga penulisan skripsi dapat selesai dengan baik.
7. Bapak **H. Aspahani, S.E., M.M., Ak** selaku penguji seminar proposal dan ujian komprehensif yang telah memberikan penilaian, arahan, saran dan

kritikan yang bermanfaat untuk melengkapi dan memperbaiki penulisan skripsi ini.

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pembelajaran serta berbagai pengalaman selama masa perkuliahan.
9. Para Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya atas bantuan administratif dan pemberkasan yang diperlukan selama perkuliahan.
10. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak **Basirun** dan Ibu **Zuhria** yang telah materi, dukungan, motivasi, nasehat, perhatian, kasih sayang serta doa yang tulus tanpa henti. Semoga Baba dan Umak selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.
11. Kakak dan Ayukku tersayang, **Ahmad Zulfan, Ahmad Multazam, Laili Barokah, Astri Ayu Ramadhayanti**. Keponakanku tercinta dan tersayang **Inayah Mufidah Ahmad**. Terima kasih atas segala doa, materi, dukungan, nasihat, motivasi, perhatian dan segalanya yang diberikan sehingga penulis bisa berada di titik ini.
12. Keluarga Besarku yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi dan perhatian tanpa henti. Sepupuku tersayang **Khoirunnisa** yang selalu ada dan menuruti semua ke-BManku.
13. Sahabat terbaikku sejak kecil, **Nina, Dona, Intan, Tri, Ragil, Akbar, Imam**. Terima kasih telah memberikan dukungan, kebersamai, memberikan kebahagiaan, motivasi semangat, solusi, menghibur dan menjadi pendengar yang baik.

14. Sahabat kuliahku, **Jessika Arwani** yang telah kebersamai hari-hari penulis dari awal studi hingga akhir, mendengarkan segala keluh kesah, memberikan semangat, solusi, motivasi dan dukungan. Teman seperjuanganku “hahaha jadi auditor” **Jessika, Nadia, Nabila, Rom Asia, Monica, Aulia, Altia**. Terima kasih telah membuat dunia perkuliahanku menjadi lebih berwarna dengan berbagi canda dan tawa, membantu, membimbing, menjadi pendengar yang baik.
15. Teman seperjuanganku sepebimbingan, **Amel dan Andini**. Terima kasih telah berjuang bersama dan selalu memberi semangat dan masukan.
16. Gas Ngeng, **Nina, Intan, Zaza, Mona, Nisa, Yaya, Juli, Putdin, Yuk Ina, Aden, Agung, Yoga, Tommy, Arrijal, Doro, Femi, Dandi**. Terima kasih telah kebersamai masa-masa kuliah, memberikan dukungan, motivasi, semangat, tebengan, pendengar yang baik, mewarnai masa kuliahku.
17. **Organisasiku dan teman-teman didalamnya**. Terima kasih telah mempercayai untuk diberikan amanat yang sangat membantu untuk mengembangkan potensi, menambah pengalaman dan banyak pelajaran yang bisa diambil.
18. Seluruh teman-teman angkatan 2020 dari Fakultas ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya atas kebersamaan dan kesan yang baik selama perkuliahan.
19. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu Universitas Sriwijaya, Khususnya Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan memberikan ilmu.

20. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
21. *Last but not least*, untuk diri sendiri **Nabila Azzahra**. Terima kasih telah berkerja keras untuk tetap berjuang dan bertahan hidup dengan memilih menghadapi kehidupan ini tanpa berhenti. Terima kasih sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini walaupun secara bersamaan ujian lain datang kepadamu, kamu tetap tidak berhenti berproses walaupun prosesmu tidak sesuai rencanamu. Sekali lagi terima kasih untuk tetap bertahan hidup dengan kondisi dirimu yang sebenarnya tidak baik-baik saja.

Indralaya,

Penulis



Nabila Azzahra

NIM. 01031182025040

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa :

Nama : Nabila Azzahra

NIM : 01031182025040

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Pengauditan

Judul Skripsi : Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021)

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Indralaya, 17 Juli 2024

Dosen Pembimbing,



Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak
NIP 198812102019032017,

Mengetahui,
Plt. Ketua Jurusan Akuntansi,



Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph.D.
NIP 196211121989111001

ABSTRAK

PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021)

Oleh:
Nabila Azzahra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data sekunder. Populasi dari penelitian ini adalah pemerintah provinsi di Indonesia dengan tahun pengamatan 2017-2021. Jumlah sampel penelitian sebanyak 26 pemerintah provinsi yang diperoleh melalui Teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda data panel dengan menggunakan program *software eviews*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit dan tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi, sementara temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Kata kunci: *opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit, tingkat korupsi*

Dosen Pembimbing,



Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak
NIP 198812102019032017

Mengetahui,
Plt. Ketua Jurusan Akuntansi,



Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph.D.
NIP 196211121989111001

ABSTRACT

**THE INFLUENCE OF AUDIT OPINION, AUDIT FINDINGS, FOLLOW-UP
ON AUDIT RESULTS ON THE LEVEL OF CORRUPTION
(Study of Provincial Governments in Indonesia 2017-2021)**

**By:
Nabila Azzahra**

This research aims to determine the influence of audit opinions, audit findings, and follow-up to audit results on the level of corruption in provincial governments in Indonesia. The method used in this research is a quantitative method with secondary data. The population of this research is the provincial government in Indonesia with the observation year 2017-2021. The total research sample was 26 provincial governments obtained through purposive sampling technique. The data analysis technique used is multiple panel data regression using the eviews software program. The research results show that audit opinions and follow-up audit results have no effect on the level of corruption, while audit findings have an effect on the level of corruption.

Keywords: audit opinion, audit findings, follow-up to audit results, level of corruption

Chairman,



Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak
NIP 198812102019032017

Acknowledge by,

On Behalf of Head Accounting Department



Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph.D.
NIP 196211121989111001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Nabila Azzahra
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Batu, 08 Mei 2002
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Tanjung Batu
Email : nabilaazzahra221180@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

1. 2008-2014 : SD Negeri 16 Tanjung Batu
2. 2014-2017 : SMP Negeri 1 Tanjung Batu
3. 2017-2020 : SMA Negeri 1 Tanjung Batu
4. 2020-2024 : Universitas Sriwijaya

PENGALAMAN ORGANISASI

1. 2022-2023 : LDF Ukhuwah FE UNSRI (Sekretaris Departemen Sosial Masyarakat)
2. 2022-2023 : HIMUKTA (Bendahara Umum)
3. 2021-2022 : UKM UNSRI Mengajar (*Fundraiser Departement*)
4. 2021 : LDF Ukhuwah FE UNSRI (Anggota Departemen Sosial Masyarakat)
5. 2020-2021 : HIMUKTA (Sekretaris Departemen Sosial Masyarakat)
6. 2020-2021 : IMA FE UNSRI (Anggota Divisi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat teoritis	12
1.4.2 Manfaat praktis	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Keagenan.....	14
2.1.2 Audit Pemerintah	16

2.1.3 Korupsi.....	18
2.1.4 Opini Audit	24
2.1.5 Temuan Audit	28
2.1.6 Tindak Lanjut Hasil Audit	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
2.3 Alur Pikir	37
2.4 Hipotesis	38
2.4.1 Pengaruh Opini Audit Terhadap Tingkat Korupsi.....	38
2.4.2 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi.....	39
2.4.3 Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	41
3.2 Rancangan Penelitian	41
3.3 Jenis dan Sumber Data	42
3.4 Populasi dan Sampel	42
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	44
3.5.1 Tingkat Korupsi	44
3.5.2 Opini Audit	44
3.5.3 Temuan Audit	45
3.5.4 Tindak Lanjut Hasil Audit	45
3.6 Teknik Analisis Data	47
3.6.1 Statistik Deskriptif	47
3.6.2 Analisis Regresi Data Panel.....	48
3.6.3 Uji Model.....	50
3.6.4 Uji Hipotesis	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.2 Hasil Penelitian.....	55
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	55
4.2.2 Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	57
4.2.3 Hasil Analisis Regresi Data Panel	59
4.2.4 Hasil Uji Hipotesis.....	61
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	64

4.3.1 Pengaruh Opini Audit Terhadap Tingkat Korupsi.....	64
4.3.2 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi.....	65
4.3.3 Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Keterbatasan	72
5.3 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Kriteria Sampel Penelitian	44
Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	47
Tabel 4.1 Daftar Sampel Pemerintah Provinsi di Indonesia	55
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	56
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow	59
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	60
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Regresi Panel dengan Random Effect Model	61
Tabel 4.7 Hasil Uji T-test.....	63
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik CPI Negara di Asia Tenggara tahun 2021	2
Gambar 1.2 Grafik Tren Penindakan Korupsi oleh KPK di Indonesia	4
Gambar 1.3 Grafik Tren Data Tindak Pidana Korupsi dari tahun 2017-2021	5
Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Pemerintah Provinsi di Indonesia	78
Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian	79
Lampiran 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	83
Lampiran 4 Hasil Uji Chow	83
Lampiran 5 Hasil Uji Hausman	83
Lampiran 6 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	84
Lampiran 7 Hasil Estimasi Regresi Panel dengan Random Effect Model	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

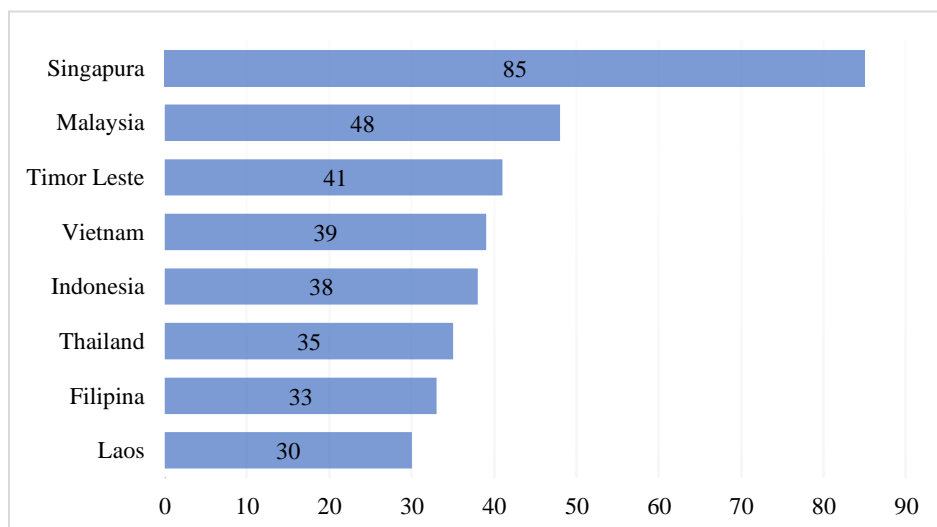
Good governance atau tata kelola pemerintah yang baik merupakan suatu konsep yang diterapkan oleh pemerintah atau organisasi dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang optimal. Dalam usahanya untuk menerapkan *good governance*, pemerintah Indonesia berupaya memperbaiki sistem pemerintahannya dari yang awalnya cenderung sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi mengharuskan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan. Desentralisasi diyakini akan membawa dampak positif karena masyarakat akan lebih terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Namun dalam implementasinya seringkali muncul berbagai masalah yang mengakibatkan pelayanan publik tidak mencapai tingkat optimal (Kurniawati & Pratama, 2021). Pengelolaan sumber daya yang tidak efektif dan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban adalah dua faktor yang dapat menyebabkan masalah tersebut terjadi sehingga dapat menyebabkan kecurangan (*fraud*), salah satunya adalah korupsi.

Korupsi bukanlah fenomena yang baru muncul setelah reformasi. Cameron et al. (2009) menemukan bahwa sebelum reformasi, praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) cenderung terpusat di kalangan keluarga presiden, pemimpin

militer, dan konglomerat China. Namun, sejak dimulainya era demokrasi pada tahun 1998, kebebasan media telah membuat kasus korupsi lebih terpapar (Jehandu et al., 2020). Korupsi telah diakui dan dilakukan oleh banyak orang, terutama dari kalangan masyarakat elit. Tindakan korupsi merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu, perusahaan maupun pemerintahan dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi, merugikan orang lain, atau merugikan suatu entitas yang memanfaatkan kekuasaan, jabatan, atau posisi, dan dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi nasional serta menghambat pertumbuhan dan pembangunan nasional yang memerlukan efisiensi tinggi (Aminah, 2020). Maraknya korupsi pada suatu negara akan menyebabkan berbagai dampak negatif pada perekonomian dan membuat adanya ketimpangan pendapatan sehingga angka kemiskinan semakin meningkat. Saat ini, Indonesia masih dihadapkan pada masalah korupsi yang signifikan di tingkat dunia.

Gambar 1.1

Grafik *Corruption Perception Index* Negara di Asia Tenggara tahun 2021



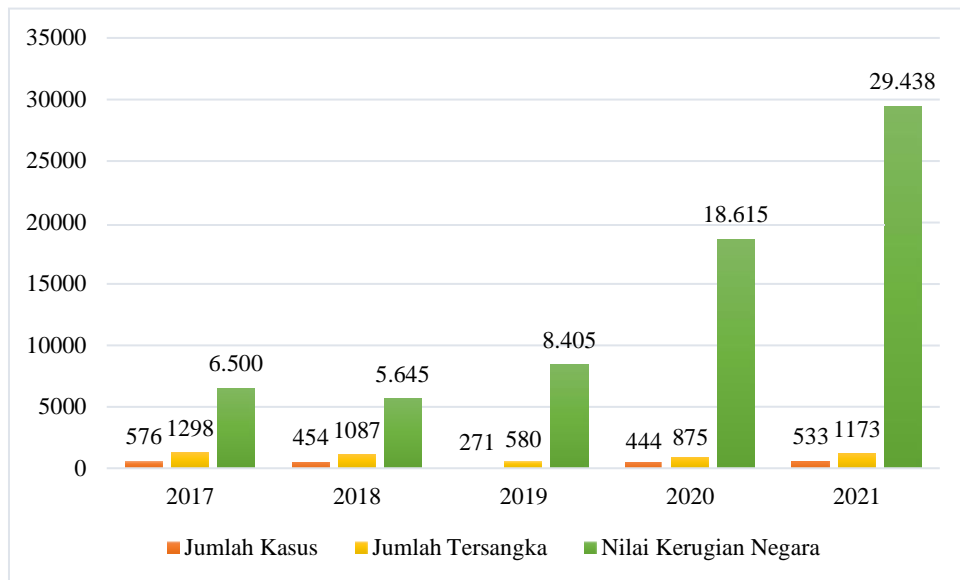
Sumber: *Transparency Internasional*

Transparency Internasional (TI) merupakan sebuah organisasi non-pemerintah dengan cakupan internasional yang bergerak untuk menangani korupsi. Organisasi ini melakukan pengukuran tingkat korupsi di berbagai negara menggunakan *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK), menggunakan skala 0-100 yang berarti skor 0 menunjukkan suatu negara sangat korup, sedangkan skor 100 menunjukkan bahwa suatu negara bersih dari korupsi. Berdasarkan gambar 1, pada tahun 2021 skor CPI Indonesia mencapai skor 38, menempatkan Indonesia di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei. Sedangkan pada tahun 2020, skor CPI Indonesia mencapai skor 37 yang menempatkan Indonesia di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Dengan demikian, Indonesia mengalami kenaikan skor 1 menjadi 38 dari 37 pada tahun 2020 ke 2021, tetapi kenaikan skor tersebut belum mencerminkan peningkatan yang signifikan sehingga tingkat korupsi di Indonesia dapat dikatakan masih cukup tinggi.

Pada tahun 2021 skor CPI Indonesia masih berada di bawah rata-rata skor CPI Internasional yang berkisar pada angka 43. Di ruang lingkup Asia Tenggara, posisi Indonesia dalam hal skor CPI berada pada posisi kelima dengan skor 38, dalam hal ini Indonesia berada di bawah negara seperti Singapura dengan skor CPI sebesar 85, Malaysia dengan skor CPI sebesar 48, Timor Leste dengan skor CPI sebesar 41, dan Vietnam dengan skor CPI 39. Tingkat korupsi yang tinggi dalam suatu negara dapat merugikan ekonomi negara tersebut dan mengindikasikan kurangnya efisiensi penyelenggaraan pemerintah karena peran pemerintah dalam alokasi sumber daya masih belum mencapai tingkat optimal (Fahmy Rosyadi & Budding, 2017).

Gambar 1.2

Grafik Tren Penindakan Korupsi oleh KPK di Indonesia



Sumber: Laporan *Indonesia Corruption Watch*

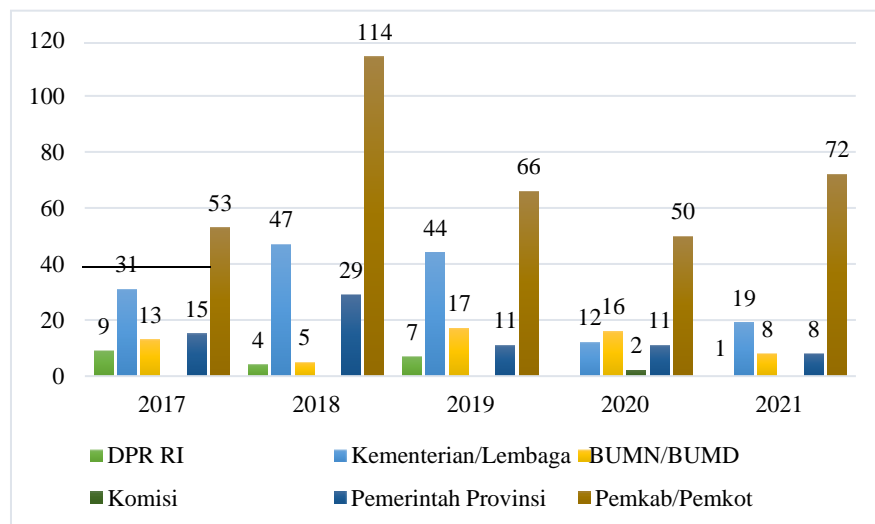
Menurut Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi yang dipublikasikan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2021 menyampaikan bahwa penindakan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum dari tahun 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif, sedangkan potensi nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi trennya cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa dari segi pengawasan pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah setiap tahun semakin buruk.

Desentralisasi menggeser korupsi dari tingkat pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah, yang disebut desentralisasi korupsi (Fahmy Rosyadi & Budding, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa sejak otonomi daerah, seringkali terjadi kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Jumlah kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah menunjukkan bahwa otonomi daerah (desentralisasi)

menjadi masalah utama dalam mewujudkan pemerintah yang bebas korupsi. Fenomena banyaknya kasus korupsi berpotensi melahirkan peraturan yang korup yang menungkingkan pejabat pemerintah daerah untuk mengambil uang rakyat dengan peraturan yang mereka buat sendiri (Kurniawati & Pratama, 2021). Laporan *Indonesia Corruption Watch* mengungkapkan bahwa mayoritas kasus korupsi dilakukan oleh kepala daerah dan terjadi di sektor non-infrastruktur atau keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap menjadi fokus utama kasus korupsi, oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang efektif untuk mencegah korupsi di daerah, terutama dengan luasnya pelaksanaan otonomi daerah (Utami, 2020).

Gambar 1.3

Grafik Tren Data Tindak Kasus Korupsi dari tahun 2017 sampai 2021



Sumber: <https://acch.kpk.go.id/berdasarkan-instansi>

Jika kasus-kasus dikategorikan berdasarkan lembaga, gambar 3 menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota adalah tempat paling umum di mana kasus korupsi muncul. Selain itu, sebagian besar korupsi paling banyak terjadi di

kementerian dan lembaga, sementara itu urutan ketiga terjadi di pemerintah provinsi. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah untuk tercapainya *good governance* belum mencapai tingkat optimal. Layanan pemerintah yang lebih baik bagi masyarakat harus disediakan jika otonomi daerah diberlakukan (Kurniawati & Pratama, 2021).

Salah satu kendala yang harus diselesaikan adalah meningkatnya jumlah kasus korupsi di pemerintahan daerah Indonesia. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada efektivitas lembaga-lembaga pemerintah karena prevalensi korupsi selama periode reformasi. Salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas pemerintahan adalah inisiatif pemerintah dalam upaya memberantas korupsi (Jehandu et al., 2020). Dalam mencapai *good governance* dan meningkatkan kualitas pelayanan publik penting untuk memenuhi atas ketiga aspek. Aspek pertama melibatkan pengawasan eksternal oleh masyarakat, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya. Aspek kedua melibatkan pengendalian internal untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Aspek ketiga melibatkan undang-undang dan peraturan (Epriliani, 2022).

Peran lembaga pemeriksaan sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, di mana lembaga tersebut berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya dalam organisasi (Jehandu et al., 2020). Salah satu fungsi pemeriksaan yang dapat diimplementasikan adalah melalui proses audit, baik itu audit internal maupun eksternal. Kedua jenis audit tersebut sangat penting untuk mendeteksi atau

memberikan informasi mengenai pelanggaran dan kecurangan, seperti pengeluaran sumber daya publik yang tidak sesuai atau hilang (Amyulianthy et al., 2022). Dimungkinkan juga untuk memanfaatkan laporan audit yang dihasilkan untuk menemukan korupsi pada pemerintah daerah (Triya Setia Ningsih, 2022). Oleh karena itu, audit pemerintah memainkan peran khusus dalam memerangi korupsi dengan membentuk mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghentikan perkembangan praktik korupsi.

Opini audit merupakan faktor yang penting untuk mengukur efektivitas pengawasan dan penilaian kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Albab et al., 2019). Salah satu indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam sistem *reward and punishment* adalah opini audit yang diberikan oleh BPK. Mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah salah satu dari tiga persyaratan untuk sistem pemberian *reward*, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mendapatkan insentif tambahan. Dalam upaya menurunkan tingkat korupsi yang terjadi, opini audit yang wajar menunjukkan bahwa laporan keuangan memiliki tingkat pertanggungjawaban yang baik. Ketika pemerintah daerah mendapat opini yang wajar menunjukkan bahwa pengelolaan dana negara telah terlaksana dengan baik dan tidak ada penyelewengan, terutama korupsi (Kurniawati & Pratama, 2021). Faktanya, opini audit dan kinerja keuangan yang baik tidak menjamin bahwa pemerintah daerah tidak terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini terbukti pada tahun 2021, di mana seorang Gubernur Sulawesi Selatan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait penerimaan suap dalam proyek infrastruktur di wilayah Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan. Fakta tersebut bertentangan dengan opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021.

Bukti temuan pemeriksaan atau temuan audit juga diindikasikan dapat memengaruhi tingkat korupsi suatu lembaga pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh (Amyulianthy et al., 2022) menyatakan bahwa temuan audit, yang mengungkapkan isu-isu penting dan relevan yang ditemukan selama audit adalah "*bulling block*" dari laporan audit. Agar audit dianggap relevan hasilnya harus sejalan dengan tujuan dan sasaran audit yang dinyatakan, sedangkan temuan dianggap material harus memiliki pengaruh signifikan terhadap proses organisasi yang diperiksa. Temuan audit selama proses audit dapat menginformasikan suatu hal penting terkait adanya masalah-masalah yang ada pada saat audit. Temuan audit menjelaskan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern merupakan salah satu unsur penting dalam suatu lembaga pemerintah karena menjadi sarana untuk mendeteksi adanya korupsi pada lingkungan pemerintahan yang mengakibatkan kerugian negara (Utami, 2020). Rendahnya sistem pengendalian intern yang diterapkan akan menjadi potensi penyimpangan pada aspek finansial seperti korupsi (Perdana & Prasetyo, 2023).

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan administrasi pemerintah daerah perlu diungkapkan (NurFaidah & Novita, 2022). Jika terjadi peningkatan ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dapat

memicu potensi munculnya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan RI membuktikan pelanggaran peraturan perundang-undangan, termasuk tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dan pemborosan uang negara (Kurniawati & Pratama, 2021). Kecurangan seperti korupsi dapat diminimalkan melalui pencegahan yang efektif, yaitu dengan mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah dan mendeteksi sejak dini ketidakpatuhan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah diwajibkan untuk menunjukkan ketaatan sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan proses pengelolaan keuangan agar korupsi dapat dihindari. Auditor membuat rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil audit untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana negara dan kesalahan penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya dapat diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah daerah (Kurniawati & Pratama, 2021). Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen mereka untuk memperbaiki kekurangan dalam pengelolaan negara dengan mengikuti apa yang telah direkomendasikan oleh pemeriksa (Amyulianthy et al., 2022). Hal ini dapat meningkatkan kualitas daerah seiring dengan peningkatan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengetahui hubungan antara hasil audit yang dilakukan oleh BPK dengan tingkat korupsi. Penelitian oleh

Novita Sari Naibaho & Kurnia Shanti (2022) menunjukkan bahwa secara parsial tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga dipengaruhi oleh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sementara itu, secara simultan tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga dipengaruhi oleh temuan audit, opini audit, dan tindak lanjut hasil audit. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil audit dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadi kasus kecurangan, terutama korupsi di dalam instansi pemerintah. Temuan penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Albab et al. (2019).

Beberapa penelitian lainnya justru menunjukkan hal sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Triya Setia Ningsih (2022) menyatakan bahwa temuan audit, opini audit, dan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Budiman & Amyar, 2021) yang menunjukkan bahwa kasus korupsi di kementerian dan lembaga Indonesia tidak dipengaruhi oleh opini audit, rekomendasi audit, dan temuan kerugian negara.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara hasil audit dengan tingkat korupsi, sementara penelitian lain menunjukkan temuan yang sebaliknya. Dengan melihat latar belakang dan *research gap* penelitian sebelumnya, serta kumpulan teori yang sudah ada, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi di lingkungan pemerintah daerah provinsi di

Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus korupsi yang dapat berujung pada peningkatan tingkat kemiskinan pada suatu negara. Pemerintah yang dianggap sebagai entitas independen oleh masyarakat, bertanggung jawab mengelola keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga tujuan awal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Dalam rangka mencegah kasus korupsi, penelitian ini berfokus pada peran penting audit pemerintah yang efektif sebagai upaya menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah korupsi yang memiliki dampak yang sangat besar bagi suatu negara.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari Naibaho & Kurnia Shanti (2022) dengan judul “Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, Tindaklanjuti Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi di Kementerian/Lembaga”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, perbedaan pengukuran pada variabel temuan audit dan tindak lanjut hasil audit. Penelitian terdahulu menggunakan jumlah temuan disesuaikan dengan jumlah temuan perkapita untuk mengukur temuan audit, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan logaritma natural nilai temuan pemeriksaan BPK RI. Penelitian terdahulu menggunakan logaritma natural penyeteroran penyerahan aset negara dibatasi dalam rupiah untuk mengukur tindak lanjut hasil audit, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jumlah TLRHPSR/ jumlah rekomendasi X 100. Kedua, populasi penelitian. Berbeda dengan penelitian terdahulu, yang berfokus pada kementerian/lembaga Indonesia, penelitian ini menggunakan pemerintah

daerah tingkat provinsi di Indonesia sebagai populasinya.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang penelitian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia ?
2. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia ?
3. Apakah tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber referensi yang berguna untuk penelitian mendatang dan sekaligus sebagai pembanding, menambah pemahaman

dan pengetahuan dalam bidang auditing di sektor publik, khususnya terkait isu korupsi dengan membuktikan secara empiris opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai alternatif solusi bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan korupsi, sehingga kasus korupsi khususnya pada instansi pemerintah tidak lagi merajalela. Hasil penelitian ini dapat menginspirasi dalam meningkatkan audit yang lebih baik, sistem pengendalian intern yang lebih kuat, penuntutan kasus korupsi yang lebih efektif, dan mendorong terlaksananya tindak lanjut hasil audit. Membantu mengarahkan kebijakan dengan cara mengurangi atau menghilangkan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, A. U., Nur savitri, A. S., & Anwar, S. (2019). Analisa Hasil Audit Pemerintah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. *Accounting Global Journal*, 3(2), 103–117. <https://doi.org/10.24176/agj.v3i2.3587>
- Aminah, W. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 94. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i2.3295>
- Amyulianthy, R., Tejokusumo, I., & Amyulianthy, N. (2022). Audit Pemerintah dan Indikasi Tindak Pidana Korupsi. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 110–129. <https://doi.org/10.35814/jrb.v5i2.1468>
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2006). *Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach*. New Jersey: Pearson International Edition.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2022. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*
----- . 2021. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*
----- . 2020. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*
----- . 2019. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*
----- . 2018. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*
- Budiman, M. A., & Amyar, F. (2021). The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels in the ministries and institutions of the Republic of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 113–129. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.471>
- Cinintya, C., Gamayuni, R. R., & Dharma, F. (2022). Pengaruh Transparansi dan Hasil Audit Laporan Keuangan terhadap Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2721.
- Epriliani, D. (2022). Pengaruh Penerapan Good Governance, Pengawasan Intern Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 79–90. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1198>

- Fahmy Rosyadi, C., & Budding, T. (2017). The Effectiveness of BPKP Fraud Audit Finding on Determining the Level of Corruption in Indonesian Provinces 1. *Journal of Society and Governance*, 1(2), 90245.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gujarti, D. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika (Terjemahan)*. Buku2. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat; Jakarta.
- Handoyo, Eko. (2013). Pendidikan Antikorupsi. Yogyakarta: Ombak
- Indonesia Corruption Watch*. (2021). *Laporan Tren Korupsi Tahunan 2021*
- Inge, N. (2023). Diduga Korupsi Dana Hibah Sumsel, Mantan Ketua Koni Sumsel dituntut 2 Tahun Penjara. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/regional/read/5556286/diduga-korupsi-dana-hibah-sumsel-mantan-ketua-koni-sumsel-dituntut-2-tahun-penjara>. Diakses pada hari Minggu, 31 Maret 2024
- Jehandun, V., Salle, A., & Allo Layuk, P. K. (2020). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Di Pemerintah Provinsi Papua. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 4(3), 114–131. <https://doi.org/10.52062/keuda.v4i3.1097>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). “*Penanganan TPK Berdasarkan Instansi*”. <https://acch.kpk.go.id/berdasarkan-instansi>.
- Kurniawati, A. D., & Pratama, Y. M. (2021). The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 25(1), 54–64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art6>
- Novita Sari Naibaho, E., & Kurnia Shanti, Y. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Opini, Tindaklanjuti Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi Di Kementerian/Lembaga. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 6(1), 25–40. <https://doi.org/10.33884/jab.v6i1.4557>
- NurFaidah, N., & Novita, N. (2022). Analisis Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Berdasarkan Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan Spi Dan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 27(1), 55–65. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i1.308>
- Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit

Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007

Perdana, A. I., & Prasetyo, T. J. (2023). Apakah Opini Audit, Pengendalian Internal, Dan Apbd Memengaruhi Tingkat Korupsi Di Pemerintah Daerah? *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 8(1), 74–89.

Transparency International Indonesia. (2021). *Corruption Perception Index Tahun 2021*

Triya Setia Ningsih, S. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit Dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11, 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*

Utami, F. L. (2020). Pengaruh Opini Audit , Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Jumlah Kasus Korupsi. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(2), 255–264. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita/article/view/profita.v13i2.008>

Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*. Ekonosia: Jakarta.